

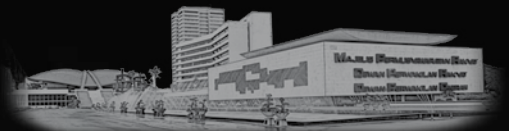


BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 858/IV/2015

III/APRIL 2015



Konsultasi DPR-Presiden Bahas Pencalonan Kapolri dan APBNP

Konsultasi DPR-Presiden Bahas Pencalonan Kapolri dan APBNP



Suasana rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Presiden bahas calon Kapolri dan APBN-P 2015

Ketua DPR Setya Novanto bersama Pimpinan DPR lainnya didampingi Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan BURT dan Pimpinan Komisi III serta Pimpinan Fraksi-fraksi Senin (6/4) menggelar pertemuan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menko dan Menteri Kabinet Kerja.

Rapat konsultasi yang dilangsungkan di Ruang Pustaka Loka Nusantara IV membahas dua masalah sifatnya konsultatif dan koordinatif, yaitu pencalonan Kapolri dan APBN Perubahan. Menurut Ketua DPR, penjelasan

Presiden atas kedua masalah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan yang akan dilakukan oleh DPR sesuai mekanisme yang ada yaitu UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

“Suasana pertemuan berlangsung santai, khidmat sehingga masalah-masalahnya akan selesai dengan baik,” ungkap Novanto.

Presiden Joko Widodo dalam penjabarannya mengatakan, pertemuan konsultasi ini merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik, sebab melalui forum ini bisa dibicarakan masalah

kebangsaan dari hati-hati dalam suasana kekeluargaan. “Jangan ada yang berpikiran pertemuan tadi ribut atau ramai. Sama sekali tidak, sangat kekeluargaan, dan diharapkan akan memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan,” tukasnya.

Dalam konsultasi, menurut Presiden, ditanyakan soal Kapolri dan implementasi APBN-P Perubahan 2015. Sehubungan masalah Kapolri, surat Presiden dikirim ke DPR tanggal 18 Februari 2015, dan dijelaskan soal tidak dilantikannya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena menimbulkan perdebatan di masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat. Untuk kebutuhan kepolisian RI ke depan, maka Presiden mengajukan Kapolri yang baru. “Kami mengajukan Kapolri baru karena alasan sosiologis dan yuridis,” tegasnya.

Sedangkan pelaksanaan APBNP, Presiden menjelaskan bahwa sudah berjalan dibanding tahun lalu pada posisi Januari-31 Maret 13,6% maka tahun ini sudah mencapai 18,5%. Artinya pelaksanaannya sudah berjalan dan diharapkan pelaksanaannya bisa lebih dipercepat lagi. Pertemuan konsultasi berlangsung sekitar 3 jam dan sesuai jumpa pers tidak ada tanya jawab. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

DPR RI Dorong Peran Parlemen Dalam Kerjasama Selatan-Selatan

Ketua DPR Setya Novanto menyadari telah terjadi transformasi ekonomi dan politik di kawasan Asia Afrika dalam dua dekade terakhir serta perkemba-

ngan dimensi baru hubungan didalam kawasan selatan, juga selatan dan utara, Karena itu, perlu didorong dialog intensif antar anggota Parlemen di

Asia Afrika.

“Ini merupakan waktu yang tepat untuk dialog intensif antara anggota parlemen dari wilayah Asia dan Afrika.

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) ; Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati ; Muhammad Husen ; Sofyan Effendi | **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya ; Naefuroji ; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita



Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BKSAP DPR RI

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-60 Konferensi Asia-Afrika, kami senang untuk mengumumkan bahwa DPR Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi parlemen di wilayah Asia dan Afrika,” ujar Setya Novanto saat acara *afternoon tea* dengan perwakilan Dubes di kawasan Asia Afrika, Gedung Nusan-

tara, Rabu, (8/4).

DPR RI atau Indonesia, lanjutnya, akan menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen antar negara Asia dan Afrika. “Tujuan pertemuan kali ini yaitu dalam rangka penguatan Peran Parlemen dalam Kerjasama Selatan-Selatan untuk mempromosikan Dunia Perdamaian dan Kemakmuran, dan

itu adalah suatu kehormatan untuk mengundang seluruh Parlemen di Asia Afrika,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Novanto, kerja sama antara Selatan-Selatan dimulai, diatur dan dikelola oleh negara-negara berkembang sendiri. “Ini merupakan cara baru kerja sama yang memungkinkan saling berbagi dalam mendukung perkembangan pengetahuan dan pengalaman, pelatihan, transfer teknologi, serta kerjasama keuangan dan moneter dan sumbangan antara negara berkembang, serta antara negara-negara kurang berkembang, di kawasan Selatan,” katanya.

Dia menambahkan, dalam rangka mengintensifkan kerjasama Selatan-Selatan atas dasar kolektif kemandirian perlu didukung dalam rangka meningkatkan pembangunan bangsa kita. “DPR sendiri percaya partisipasi parlemen dalam dialog tentang kerjasama Selatan-Selatan tidak hanya akan menambah dimensi parlemen untuk mendorong kerjasama antara Parlemen, tetapi juga untuk mempromosikan potensi bangsa kita serta meningkatkan kerjasama antar kawasan,” jelasnya. (Si) foto: naefurodij/parle

Tupoksi Kementerian Perlindungan Anak Harus Diubah

DPR mengapresiasi Komunitas Peduli Anak Indonesia yang sangat *concern* terhadap nasib anak Indonesia dari berbagai kejahatan dan kekerasan anak, khususnya dari kejahatan seksual. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat menerima Komunitas Peduli Anak Indonesia di ruang rapat pimpinan DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ketua Komunitas Peduli Anak Indonesia, Rossa Dino Pati Djalal mengungkapkan bahwa kedatangannya tersebut untuk mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kejahatan terhadap anak, meskipun Inpres No.5 Tahun 2014 telah dikeluarkan. Namun ia melihat hal tersebut belum membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perlindungan anak Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang hingga pertengahan



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Komunitas Peduli Anak Indonesia

April 2015 ini mencapai ribuan kasus.

“Oleh karena itu kami berharap agar DPR yang memiliki fungsi pengawasan untuk dapat lebih mengawasi pelaksanaan dari Inpres tersebut. Hal ini semata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak

kami, anak Indonesia dalam proses menggapai cita-cita dan impiannya,” ungkap Rossa.

Senada dengan Ketua DPR RI, Anggota Komisi VIII, Desy Ratnasari yang ikut mendampingi Setya Novanto menerima Komunitas tersebut, juga

sangat mengapresiasi Komunitas Peduli Anak Indonesia yang mayoritas merupakan ibu-ibu yang juga masih memiliki anak-anak di bawah umur. Dikatakannya, Ibu merupakan ujung tombak perlindungan anak. Lebih jauh Desy juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah mengupayakan untuk kembali merevisi Undang-undang Perlindungan Anak yang baru disahkan 2014 lalu.

“Kami (Komisi VIII) juga ingin merevisi UU Perlindungan Anak yang baru disahkan tahun 2014 lalu, karena ada beberapa butir yang menurut kami kurang bisa memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Salah satunya terkait dengan hukuman bagi

pelaku kekerasan terhadap anak yang maksimal selama 15 tahun kurungan penjara. Hukuman itu jelas sangat ringan dibanding dengan dampak psikologis atas kekerasan yang dialami anak dalam hidupnya,” ungkap Desy.

Dilanjutkan Desy, rencana revisi UU tersebut belum dapat dilakukan mengingat UU tersebut masih seumur jagung alias baru saja disahkan. Namun ia berjanji akan terus memperjuangkan hal tersebut untuk menjadi prioritas Prolegnas di tahun mendatang.

Kini dikatakannya, hal lain yang tengah diperjuangkannya adalah mengubah Tupoksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA) yang

hanya sekedar mengordinasi dan bukan Kementerian teknis yang dapat langsung *action* atau bergerak.

“Anggaran Kementerian PP & PA ini hanya sekitar 217 Miliar, sangat sedikit jika dibanding kementerian lainnya. Oleh karena itu sangat dimaklumi jika kementerian ini tidak bisa berbuat banyak. Tapi tentu saja hal itu tidak bisa terus menerus menjadi alasan untuk tidak bisa melindungi anak Indonesia secara keseluruhan. Akhirnya kami berpandangan untuk mengubah Tupoksi Kemen PP & PA ini agar bisa langsung bergerak memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. (Ayu)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Pimpinan DPR Terima Tim Independen Bahas Calon Kapolri dan KPK



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Tim Konsultatif Independen

Pimpinan DPR RI menerima kunjungan Tim Konsultatif Independen antara lain Jimly Asshiddiqi, Imam Prasodjo, Widodo Umar, Ugro Seno dan Hikmahanto Juwana. DPR RI mendapatkan masukan terkait masalah Polri, KPK, dan RUU KUHP. “Kami membahas terkait masalah-masalah hukum,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon, Senin, (6/4) di Gedung DPR RI.

Jimly Asshiddiqi selaku Tim Konsultatif Independen berharap, sesuai yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo saat Rapat Konsultasi dengan DPR, untuk segera menindaklanjuti dan segera memproses pencalonan Kapolri karena bangsa dan negara Indonesia membutuhkan kepastian mengenai Kapolri definitif.

Ia mengatakan, prosedur formal terlalu diutamakan sehingga kebutuhan untuk segera mendapatkan Kapolri yang definitif akan tertunda-tunda. “Mudah-mudahan dalam waktu 20 hari kerja ke depan, kita sudah mendapatkan Kapolri definitif, mudah-mudahan *nggak* ada masalah lagi,” katanya.

Pada kesempatan itu, kata Jimly, Tim juga sudah mendengar dari Pemerintah dan DPR, bahwa alternatifnya adalah urusan Wakil Kapolri diserahkan kepada internal Polri sen-

diri. Tim menganggap itu jalan keluar yang baik supaya fokus mengisi dahulu jabatan Kapolri.

Namun ada juga pandangan lain yang perlu juga mendapat pertimbangan agar DPR juga memperhatikan perkembangan situasi kebangsaan, persepsi masyarakat kepada penegak hukum baik kepada Polri dan Kejaksaan. Selain itu adanya kebutuhan untuk segera membangun kembali kepercayaan masyarakat baik kepada KPK maupun Kepada Polri. Maka dalam mengisi jabatan-jabatan kosong diharapkan pilihan-pilihan itu sesuai dengan harapan untuk mengembalikan kepercayaan itu.

“Jikalau sulit, bilamana perlu dikosongkan jabatan Wakapolri tidak apa-apa. Sekarang tidak ada Kapolri bisa, kalau sekedar tidak ada Wakapolri sampai satu tahun kenapa masalah. Tapi ini satu alternatif yang dibicarakan, walaupun secara formal kita fokus dulu pada Kapolri,” ungkapnya.

Selanjutnya Jimly mengatakan, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Kemungkinan pertama diterima pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Bisa juga alternatif lain, BG yang sudah disetujui DPR namun tidak dilantik oleh Presiden masih menjadi pertanyaan sebagian anggota Dewan.

Karena itu, bisa saja DPR tidak menggunakan haknya. Kemudian DPR menyerahkan kembali kepada Presiden. Kalau itu yang terjadi, bisa ditafsirkan DPR setuju, tapi bisa juga ditafsirkan menyerahkan kewenangan kembali kepada Presiden untuk melantiknya. “Mudah-mudahan Badrodin Haiti dalam waktu yang tidak lama akan menjadi Kapolri dengan dua kemungkinan cara itu,” katanya.

Selanjutnya, Fadli Zon menjelaskan DPR akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Besok akan paripurna, dan terkait pemilihan Kapolri ini kita akan serahkan kepada Komisi III. Kemudian Komisi III juga akan menindaklanjuti sesuai mekanisme. Hasilnya akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR,” katanya. (as)/*foto:naefurodji/parle/iw.*

Komisi III Bisa Segera Proses Pencalonan Badrodin Haiti

Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR yang didampingi Pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan dengan Presiden Joko Widodo berhasil lebih mengerucutkan dan menyelaraskan apa yang ada di DPR maupun yang ada di Pemerintah. Dengan demikian konsultasi ini ke depan akan lebih bisa mempercepat masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini terselesaikan. Seperti agenda pencalonan Kapolri, bisa langsung lanjut dan bisa langsung untuk diproses.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sesuai mendampingi Ketua DPR bersama Pimpinan Komisi III, Badan Anggaran dan Pimpinan BURT serta Pimpinan Fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi dengan Presiden, di Gedung DPR, Senin (6/4).

Saat ditanyakan apakah dengan demikian, pencalonan Komjen Badrodin Haiti sudah bisa diterima DPR, menurut



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

Agus Hermanto akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. “Be-

sok dibacakan di rapat paripurna, lalu akan diproses di Komisi III,” katanya.

Ketika didesak kembali, berarti pembatalan Komjen BG tidak dipermasalahkan DPR lagi, Agus Hermanto menjawab “Penjelasannya seperti itu sehingga pencalonan Badrodin Haiti berarti sudah bisa mulai diagendakan oleh Komisi III,” tukasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dalam rapat konsultasi dengan Presiden tidak dijelaskan apakah akan mengirim utusan lagi ke DPR atau tidak. Sebagaimana diberitakan sebelumnya sejumlah anggota fraksi berharap Presiden menjelaskan dulu mengenai pembatalan pencalonan Komjen BG, baru kemudian penjelasan pencalonan Badrodin Haiti.

“Yang pasti Presiden akan mengikuti proses yang ada di DPR,” jelas Taufik menambahkan. (mp), foto: iwan armanias/parle/hr.

Tidak Ada Aspirasi Anggota DPR Tambah Uang Muka Mobil Pejabat

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan, tidak ada aspirasi dari anggota DPR untuk penambahan uang muka mobil pejabat. Tidak sama sekali, kalau dianggap seolah-olah keinginan dari DPR. “Itu sebatas usulan saja, tetapi ini sangat tidak masuk logika kalau seolah-olah DPR yang menjadi kambing hitam. Jangan sampai kemudian menjadi posisi yang kita nggak ngerti apa-apa, kasihan anggota DPR lain,” katanya menjawab pers di Gedung DPR, Senin (6/4)

Hal itu dikatakannya menanggapi ditekenya Perpres No.39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Pembelian Kendaraan bagi Pejabat Negara.

Saat didesak apakah Dewan bisa mengusulkan agar Perpres ini didrop, Pimpinan Dewan dari Fraksi PAN ini menyatakan Perpres menjadi ranah pemerintah bukan DPR. Namun dia menandakan, masalah itu belum pernah masuk dalam pembahasan APBN-P, kita sudah cek langsung dengan teman-

teman Pimpinan. Apalagi sesuai keputusan MK, DPR tidak bisa lagi membahas satuan tiga.

Diakui Taufik, memang ada surat DPR tetapi sebatas usulan dan tidak ada masalah. Secara normatif setiap lembaga negara boleh mengajukan usulan apapun kepada pemerintah. Dan sangat tidak fair kalau semata-mata itu karena usulan dari Ketua DPR, berlaku sampai ke DPRD dan sampai ke lembaga negara yang lain.

“Bagaimana mungkin intervensi dari Pimpinan DPR kemudian berlaku menyeluruh untuk lembaga negara lain. Silahkan undang saja seluruh Pimpinan Lembaga Negara yang lain, bagaimana keputusannya. Artinya kami justru memberikan apresiasi kepada Presiden yang akan melakukan cek ulang. Kami menyambut dengan hormat,” tandasnya.

Yang pasti lanjut, Taufik, bukan semata-mata usulan Ketua DPR lantas berlaku menyeluruh. Saat didesak,



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

apakah secara pribadi mengajukan usulan itu, “Nggak pernah, dan tidak pernah satuan tiga (program dan proyek dibahas DPR dalam kaitan APBN-P). APBN-P baru dibahas akhir Februari hingga awal Maret,” ia menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Kominfo dan BNPT Dinilai Gegabah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah gegabah dalam melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs media Islam. Kebijakan pemblokiran tanpa sosialisasi sebelumnya patut dilawan dengan langkah-langkah hukum.

“Kominfo jangan menjadi alat untuk melakukan pemberedelan seperti era masa lalu, dikaji dululah. Kalau situasinya identitasnya jelas ya tidak bisa. Prosesnya berjenjang, dipanggil dulu, dialog dulu, minta masukan dari MUI, NU, Muhammadiyah. Jadi pemblokiran yang dilakukan Kominfo dan BNPT ini gegabah,” katanya usai menerima pimpinan situs di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/15).

Dalam kesempatan itu ia juga melakukan klarifikasi terkait pernyataannya di sejumlah media yang menyatakan dukungan terhadap pemblokiran. “Waktu itu saya berfikir ini situs aneh yang tidak punya kredibilitas. Kalau memang mengajarkan radikalisme saya setuju diblokir, tapi ternyata kan tidak,” tutur dia.

Ia menjelaskan sudah mengetahui kiprah Ormas Al Irsyad yang situsnya Gema Islam turut diblokir atau Ormas Hidayatullah yang juga mengalami nasib yang sama. “Kalau punya identitas yang jelas tidak bisa, kalau al Irsyad atau Hidayatullah yang sudah berkiprah puluhan tahun tentu tidak bisa langsung



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima pimpinan situs yang diblokir Kemenkominfo

diblokir,” tandas politisi FP Gerindra ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri delapan pimpinan situs terungkap Gema Islam ternyata telah menjadi mitra BNPT sejak lama. Ormas al Irsyad juga pernah mendapat pujian dari Pimpinan BNPT karena berhasil menggelar acara pengajian yang menyuarakan deradikalisasi.

“Selama ini kami sudah seperti mitra BNPT, pimpinan kami sering bertemu dan berdialog dengan BNPT. Kami pernah mengundang ulama dari Yordania mengusung pengajian pentingnya deradikalisasi, kegiatan ini dipuji lang-

sung oleh Pimpinan BNPT. Jadi saat mendapat kabar pemblokiran, kita pikir *hoax*,” kata Budi Marta pimpinan situs Gema Islam.

Sementara itu Agus Sularto dari situs Komunitas AQI menyebut kegiatan yang ditampilkan hanyalah acara pengajian para jamaah yang tersebar di sejumlah provinsi. “Jamaah kami sekitar 10 ribu orang tersebar di Aceh, Batam, Sumbar dan daerah lain. Kami tidak mau disebut radikal. Kami hanya web pengajian, apa perlu kita mendaftar ke Dewan Pers?” pungkask dia. (iky) foto: andri/parle

Pimpinan DPR Terima Menteri dan Staf Kepresidenan

Pimpinan DPR RI menerima Menteri Pariwisata Rudiantara, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan selaku penanggung jawab nasional peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang akan diselenggarakan di Indonesia pada April mendatang.

“Acara ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengingatkan kembali akan kepeloporan Indonesia di mata

dunia. Dimana dengan adanya Konferensi Asia Afrika yang dipelopori Indonesia pada 60 tahun yang lalu, ini telah melahirkan tidak kurang dari 30 negara merdeka dan maju hingga saat ini,” jelas Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Kamis (2/4).

Sementara ditambahkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, biasanya dalam forum-forum Kepala Negara diikuti se-

cara paralel dengan forum parlemen. Untuk itu, DPR juga telah mempersiapkan diri untuk menggelar Konferensi Asia Afrika Parlemen Dunia pada rangkaian peringatan hari jadi KAA ke 60 tahun itu.

“Disinilah Peran Parlemen dalam mendukung pemerintah yakni dengan diplomasi. Oleh karena itu acara ini pun dapat digunakan untuk membantu pemerintah melakukan diplomasi de-



ngan negara-negara dunia,” jelas Fahri Hamzah.

Sementara itu, Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa pemerintah telah siap dalam persiapan event bersejarah tersebut, baik dari segi keamanan maupun berbagai hal teknis lainnya. (Ayu)

Pimpinan DPR menerima Penanggungjawab Peringatan 60 tahun KAA

Awas! Rencana Phedofilia Pride Day

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berharap kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Polri untuk memperketat keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.

Pasalnya, sebagai anggota DPR yang sekaligus sebagai aktivis yang concern terhadap perlindungan anak dan perdagangan manusia, ia mendapat informasi bahwa pada tanggal 25 April mendatang akan diadakan *Phedofilia Pride Day* yang digelar oleh para Pedofilia internasional di Indonesia. *Phedofilia Pride Day* sendiri merupakan pesta perayaan oleh para Pedofilia Internasional.

“Saya mendapat informasi dari jaringan saya bahwa pada 25 April nanti para pedofilia internasional akan menggelar *Phedofilia Pride Day*. Ini tentu sangat menakutkan sekaligus membuat geram kita. Oleh karenanya saya berharap agar pemerintah dan seluruh pihak untuk memperketat keamanan dan perlindungan terhadap anak Indonesia. Khusus untuk pihak kepolisian saya meminta agar rencana perayaan oleh para pedofilia itu dapat digagalkan alias tidak sampai terlaksana,” papar wanita yang kerap disapa Sarah ini, di gedung DPR, Rabu (8/4).

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini juga mengatakan bahwa jika sebelumnya Thailand dikatakan sebagai “surga” bagi para Pedofilia, namun belakangan Negara tetangga tersebut memperketat keamanan dan perlindungan



Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

anak-anak dari para Pedofilia Internasional. Kini, menurut informasi yang didapat Indonesia sudah menjadi “destinasi wisata baru” bagi para pedofilia internasional.

Oleh karenanya ia sangat berharap agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti informasi tersebut agar anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa itu dapat seutuhnya terlindungi baik secara fisik maupun psikis. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/hr

Baleg DPR Bahas Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Mabes Polri dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo, hari Rabu (8/4/2015) kemarin membahas Peraturan Tata Tertib DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.

“Peraturan DPR RI ini menjadi hal yang penting dan keamanan menjadi sesuatu yang mutlak karena kompleks Parlemen ini adalah merupakan lembaga negara, dimana lembaga negara ini belum mendapatkan satu perhatian khusus,” kata

Firman saat memimpin rapat tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta.

Politisi Partai Golkar ini, menerangkan bahwa dari hasil pertemuan sebelumnya dengan Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI, ada yang menarik dan banyak mengagetkan yaitu tentang informasi Kamtibmas dari Tim Mabes POLRI sebelumnya dengan aparat yang ada di Gedung DPR RI, bahwa ternyata yang namanya AC inipun bisa disabotase. “Sehingga kita yang duduk manis di ruangan ini tiba-tiba bisa

mati lemas sebab menghirup udara yang beracun, jadi ini pengamanan tidak sesederhana itu,” ungkap Firman.

Kemudian, makanan-makanan yang disajikan yang sekarang tidak terkontrol dari aspek keamanan ini juga memungkinkan disabotase oleh pihak tertentu. “Ini baru salah satu hal kecil,” imbuhnya.

Dari beberapa pengalaman, terang Firman, seperti kemarin di Gedung DPR RI ini dimana ada segerombolan orang yang merusak ruangan. Ini juga menjadi perhatian. Karena menurutnya yang dirusak bukan asset daripada salah satu partai tapi asset dari negara. “Dimana ada kelompok orang merusak fasilitas gedung negara, ini tentunya juga harus menjadi perhatian yang selama ini lepas daripada kontrol kita semua aparat yang ada di lingkungan DPR RI,” tegas Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Mabes Polri Sigit menyatakan bahwa secara garis besar didalam substansi peraturan ini harus diatur secara lebih teknis mengenai mekanisme atau tata cara pengamanan di lingkungan Gedung DPR RI, sehingga tergambar dengan jelas, pertama tentang siapa berbuat apa berkoordinasi dengan siapa dan bertanggung jawab kepada siapa.

“Itu merupakan kaidah yang baku didalam kita menyusun suatu substansi pengamanan, karena nanti ini akan dijabarkan lebih teknis lebih lanjut didalam muatan atau rumusan pasal demi pasal,” jelas Sigit.

Tentu saja, kata Sigit, pada Bab-bab awalnya dirumuskan atau diatur mengenai Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki. Maksudnya masalah material dan logistiknya termasuk Sumber Daya Pengamanan.

“Artinya siapa yang mengamankan di sini harus jelas dulu, termasuk material logistik dan sumber daya pendukungnya apa saja itu harus tergambar pada awal-awal sistematisa didalam Rancangan Peraturan DPR ini,” jelasnya.

Kemudian, kita harus bisa mengidentifikasi sasaran pengamanan. Sigit mengusulkan, sasaran pengamanan yang dispesifikasikan menjadi empat bagian, yaitu orang atau manusia, benda, dokumen, dan kegiatan.

“Tadi sempat disinggung ternyata Acupun bisa menjadi sumber ancaman demikian juga dengan makanan. Dokumentasi pun harus menjadi perhatian pengamanan karena itu sangat vital, termasuk juga kegiatan. Sasaran-sasaran tersebut akan diamankan oleh yang bertanggungjawab yang sudah dirumuskan dan ditentukan.

Ia setuju didalam peraturan ini sudah dibagi dalam bentuk zona, yang sering kita kenal sebagai Ring 1, Ring 2. Tapi itu hanya merupakan masalah nomenklatur atau penamaan.



Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menerima Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Mabes Polri

Tetapi menurutnya, lebih tepat harus memberikan kriteria, misalnya yang dimaksudkan dengan Ring 1 dimana saja dan Ring 2 dimana saja, dan selanjutnya. “Sehingga orang-orang nanti ataupun petugas yang bertanggung jawab pada Ring 1 bisa bertanggung jawab pada tingkat ancaman yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan seandainya ancaman itu terjadi,” jelas Sigit.

Menurut Sigit, ada rumusan yang belum tergambar disini yaitu tentang pelaksanaan pengamanan itu sendiri dan pertanggungjawaban pengamanan dan jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 memang disebutkan bahwa didalam pasal 4 ayat 2 Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap obyek vital nasional.

“Dari kaca mata Polri Gedung DPR ini diklasifikasikan sebagai obyek Vital, mengacu pada pasal 2 tersebut Polri hukumnya wajib memberikan bantuan pengamanan,” terang Sigit.

Bagaimana dengan masalah pengamanan internal itu sendiri yang harus berkoordinasi dengan Polri? Menurutnya harus diatur dalam Bab tersendiri didalam Peraturan DPR RI ini mengenai Bagaimana Mekanisme Koordinasi pengamanan internal yang sekarang ini disebut Satuan Pengamanan Dalam (SatPamdal). Inilah yang akan berkoordinasi dengan Polri sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2.

Menurut Sigit, dalam draft Peraturan ini tidak perlu mengatur mengenai persyaratan rekrutmen kompetensi Pamdal itu sendiri. Didalam peraturan ini fokus hanya mengatur Siapa, Berbuat apa, berkoordinasi dengan siapa dan bertanggung kepada siapa, dan di lingkungan mana dia harus melakukan kegiatan-kegiatan pengamanannya tersebut. (sc)

foto: naefurodji/parle/hr

Komisi III Klarifikasi Permintaan BNPT Blokir Situs Islam

Komisi III DPR RI mempertanyakan langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 22 situs media Islam. Dalam Rapat Dengar Pendapat sejumlah anggota komisi yang membidangi masalah

hukum ini meminta klarifikasi dari Kepala BNPT.

“Kita tadi minta klarifikasi langsung dari BNPT mengapa mengusulkan 22 situs Islam itu diblokir. Kita menilai itu jelas melanggar kecuali disampaikan transparan apa pelanggaran yang di-

lakukan,” kata anggota Komisi III dari FPAN Muslim Ayub usai rapat di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/15).

Lebih jauh wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh I ini menambahkan BNPT saat ini menghadapi tantangan cukup berat dalam menangani isu sepu-



Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub

tar terorisme di tanah air. Dari sejumlah program yang disampaikan kepada dewan, Muslim mengakui beberapa

belum dapat berjalan optimal karena terbatasnya anggaran.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mendesak Kepala BNPT agar melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat.

Sebelumnya Kepala BNPT Saud Usman Nasution menyampaikan ucapan terima kasih atas sejumlah masukan yang diterimanya. Terkait radikalisme

institusi yang dipimpinnya terus berupaya membangun pemahaman di tengah masyarakat. Ia juga menyambut baik langkah Kemenkominfo untuk membentuk Tim Panel untuk menentukan kriteria situs yang mengusung isu radikalisme.

Pada bagian lain ia juga memaparkan upaya melakukan deradikalisasi kepada narapidana terorisme di sejumlah Lapas. "Dari 242 napi teroris di tanah air, 22 orang saat ini terdata masih radikal," ungkap dia. Beragam upaya telah dilakukan termasuk menghadirkan tokoh agama untuk berdialog dengan mereka. (iky) foto: andri/parle/hr

DPR Desak Pertamina Perbaiki Infrastruktur Kilang

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Partai Nasdem mendesak Pertamina untuk memperbaiki infrastruktur kilang yang sudah tua. "Saya mendukung Pertamina untuk segera mengupgrade kilang yang ada, dan harus segera mendesain rencana pembangunan kilang baru dengan memperhatikan lokasi yang berdekatan dengan konsumen," ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (8/4).

Menurutnya, kilang baru itu nantinya akan mengolah *crude oil* impor serta dekat dengan konsumen. "Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan maka saya mengusulkan pembangunan Kilang baru itu di Pulau Lombok," ujarnya.



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

Khusus infrastruktur gas, Lanjut Kurtubi, DPR mendesak segera di percepat pembangunan infrastruktur gas, soal dana bisa saja dianggarkan dari APBN. "Jika pembangunan sudah selesai operasinya harus lewat perusahaan negara. Saya sangat menentang

kalau infrastruktur gas yang dibangun APBN diserahkan oleh asing atau swasta," katanya.

Menyinggung pembangunan listrik, dirinya mendukung pembangunan listrik 10 MW dikebut. Selain itu, harus didorong pembangunan listrik dari tenaga uap dan gas. "Tidak cukup hanya itu, kita harus mendorong semua mengingat kondisi disekitar kita yang jauh dengan negara tetangga perlu terobosan mengejar ketinggalan kita dengan negara tetangga," jelasnya.

Dirinya juga mendorong energi baru dan terbarukan serta penggunaan energi nuklir. "Perlu dipercepat pintu untuk nuklir, kita harus mereview DEN agar nuklir bukan menjadi opsi terakhir, kita butuh listrik secepatnya untuk menarik investor," katanya. (Si)

foto: naefurodji/parle/hr

BKSAP Ingin Perkuat Diplomasi Parlemen

Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno mengatakan, event konferensi parlemen dalam rangka memperingati Konferensi Asia Afrika ke 60 tahun ini bertujuan untuk memperkuat peran parlemen dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan dalam mempromosikan dunia yang damai dan makmur.

"Yang pasti event ini semacam mem-

perkuat peran Parlemen seperti yang kita sampaikan kepada para Dubes yang akan menghadiri konferensi asia afrika kita ingin memiliki peran dalam rangka memperkuat kerjasama yang sudah berjalan selama 60 tahun," ujar Teguh Juwarno kepada Parlementaria, Selasa, (8/4).

Menurutnya, event ini sangat pas



Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno

diselenggarakan dalam rangka adanya momentum konferensi Asia Afrika di Bandung. “Intinya BKSAP ingin memperkuat parlemen tidak hanya *government to government* tapi parlemen to parlemen, juga *people to people contact*,” jelasnya.

Dia menambahkan, Parlemen juga memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan antar negara. “Bagi kita Parlemen juga memiliki peran

penting dalam rangka membangun hubungan lebih baik dengan negara sahabat artinya parlemen juga punya tugas diplomatik,” paparnya.

Dia mengatakan, seperti kita tahu, fungsi parlemen juga dapat memperkuat ataupun mencairkan perbedaan antar negara. “Kita juga bisa berbagi pengalaman dalam membuat kebijakan publik dan UU. Peran parlemen disini juga mendorong komitmen

bersama dalam rangka menuntaskan agenda Asia Afrika,” katanya.

Terkait agenda lainnya, lanjutnya, persoalan Korupsi juga menjadi perhatian dalam pertemuan nantinya. “Masalah korupsi jadi tantangan memang jadi perhatian kita, juga terkait fenomena radikalisme dan semua sektor serta persoalan krisis,” paparnya.

(Si) foto: naefurodji/parle/hr

Diperlukan UU yang Kuat Untuk Kendalikan Monopoli

Banyak masalah persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terjadi monopoli oleh kelompok tertentu atau sebagai kartel dan mafia dalam kebutuhan hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai atau dimonopoli oleh negara, ternyata aturan perundang-undangnya masih memberi peluang terjadinya kartel, yang justru merugikan rakyat, bangsa dan negara selama ini. Karena itu dibutuhkan UU dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang kuat untuk mengendalikan monopoli kartel tersebut.

“Kalau monopoli atau penguasaan negara terhadap kebutuhan hajat hidup rakyat itu suatu keharusan. Seperti listrik, gas, telekomunikasi, transportasi, air, sandang, pangan, beras, minyak, gula dan sebagainya. Untuk itu diperlukan UU yang baik dan KPPU yang kuat,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. M. Farid Al-Fauzi dalam acara forum legislasi ‘RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’ bersama anggota Komisi VI DPR RI FPKS Refrizal, Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, dan Direktur Eksekutif *Institute Development of Economics dan Finance* (Indef), Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Menurut politisi Hanura itu, selama ini juga terjadi tumpang-tindihnya aturan persaingan usaha tersebut antara pusat dan daerah. Di mana aturan tentang pendirian minimarket misalnya, di daerah sudah menjadi wewenang kepala daerah, sehingga aturan dari pusat tidak berlaku di daerah. “Makanya Komisi VI DPR harus menyelesaikan revisi dua UU, yaitu UU Nomor 5 tahun 1999 tentang persai-



Suasana acara forum legislasi bertema ‘RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’

ngan usaha dan RUU BUMN, juga perlunya KPPU yang kuat,” ujarnya.

Anggota Komisi VI dari FPKS Refrizal mengakui jika UU Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tersebut lahirnya bisa disebut terburu-buru karena pasca reformasi di mana kita menginginkan sebuah UU, namun hasilnya masih memberi peluang terjadinya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Padahal, semangat dari pembentukan UU itu adalah pemberantasan KKN itu sendiri.

“Masih memberi peluang terhadap monopoli oleh asing, kartel, mafia, dan semacamnya sehingga terkesan mengabaikan kepentingan nasional. Karena itu dibutuhkan KPPU yang kuat dan jangan sampai KPPU menjadi alat untuk kepentingan asing. Sebab itu, dengan revisi UU ini diharapkan usaha nasional bangkit dan mampu mensejahterakan rakyat,” tambahnya.

Politisi dari Dapil Sumatera Barat itu menyontohkan betapa kartel

sangat diuntungkan dengan misalnya menimbun 1000 Kg gula, kalau satu Kg-nya beruntung Rp 1.000,- maka hanya salam seminggu mereka ini bisa mengantongi keuntungan Rp 1 triliun. Belum lagi beras, minyak, BBM, dan sebagainya. “Jadi, dengan revisi UU ini agar usaha nasional bangkit, dan tidak lalu melakukan privatisasi namun Indosat dijual ke asing. Tarif PLN pun termahal di dunia, maka wajar ada temuan BPK ada penyimpangan Rp 34 triliun,” ungkapnyanya kecewa.

Sementara, Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf merasa aneh dengan kebijakan Menhub Jonan saat ini yang meniadakan tarif pesawat murah, sehingga jumlah penumpang pesawat yang semula mencapai 70 juta kini turun 10 % menjadi 63 juta orang. Padahal semasa Orde Baru hanya 3 juta orang, lalu naik menjadi 30 juta orang dan sekarang 70 juta orang. Tapi, jumlah ini jauh lebih kecil dibanding Amerika Serikat dengan

penduduk 350 jutaan, penumpang pesawatnya mencapai 1,1 miliar orang. “Berarti setiap orangnya mampu membeli 3 lebih tiket pesawat,” katanya.

Dengan kondisi yang demikian menurut Syarkawi Rauf, maka kartel makin nyaman sekali. Contohnya, ada perusahaan importir gula yang keuntungannya mencapai Rp 50 miliar, dan ketika melanggar hanya didenda Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar, maka perusahaan itu tetap untung besar. Karena itu, KPPU menjadi strategis untuk memperkuat persaingan perekonomian Indonesia.

Namun, kata Enny Sri Hartati, kartel itu justru *by design dan by regulasi*, yaitu akibat aturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk melakukan kartel tersebut. Karena itu revisi UU itu semangatnya adalah memberantas KKN. Apalagi, ketidakmampuan membangkitkan perekonomian bangsa selama ini kuncinya adalah KKN. “Bahkan kuota impor di Menteri Perdagangan (Mendag) ternyata masih dikendalikan oleh kartel. Jadi, UU No.5/1999 itu masih memperkuat praktek KKN,” tuturnya. (sc) foto: andri/parle/hr

BKSAP Gelar FDG Untuk Dapatkan Masukan



Suasana Focus Discussion Group (FDG) BKSAP DPR

BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI menggelar Focus Discussion Group (FDG) yang bertajuk “Peran Lembaga Keuangan dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Ketua BKSAP Nurhayati Ali Asegaff mengatakan, FDG ini diadakan untuk mendapat masukan bagi delegasi DPR RI dalam forum Global Parliamentary Conference of Parliament Network on The World Bank and Internasional Monetary Fund (IMF) yang akan digelar pada 12-13 April 2015 mendatang di Washington DC, Amerika Serikat.

“Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya dari digelarnya FDG ini adalah untuk mendapat masukan, diplomasi internasional apa yang harus kami (DPR RI) lakukan untuk membantu pemerintah menemukan jalan keluar

atas krisis yang terjadi saat ini. Apa yang bisa kami perjuangkan di forum internasional nanti,” tanya Nurhayati kepada para narasumber atau pembicara baik dari Bank Indonesia (BI), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ataupun Bank Indonesia dan peserta FDG yang memenuhi ruang rapat BKSAP DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4).

Dijelaskan Peter Jacobs selaku Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, bahwa sebenarnya yang terjadi saat ini hingga rupiah mencapai angka 13 ribu rupiah per satu dolar ini bukan karena rupiahnya yang melemah, namun dolar yang menguat. Karena nilai tukar rupiah cukup menguat terhadap mata uang negara lain selain dolar Amerika. Sebut saja terhadap mata uang Lira, dimana ru-

piah menguat sebesar 13,6 terhadap Real Brasil, atau 6,2 terhadap Mata uang Euro. Dalam FDG tersebut Peter juga mengatakan bahwa kondisi tersebut cukup baik untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

Mendengar hal tersebut salah satu anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang hadir dalam forum FDG tersebut menyayangkan pernyataan tersebut, karena kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tersebut sangat mempengaruhi pengusaha importir. Dan dalam bertransaksi kebanyakan yang digunakan adalah mata uang dolar Amerika, bukan mata uang negara lain. Sehingga penguatan rupiah terhadap mata uang non dolar Amerika itu tidak banyak berpengaruh terhadap pengusaha impor maupun masyarakat umum.

Sementara itu bagi Anggota BKSAP yang juga anggota Komisi I DPR RI, Alimin Abdullah mengatakan bahwa DPR dan rakyat tidak memperdulikan sistem yang diambil dan dipilih pemerintah dalam mengatur perekonomian negeri ini, yang terpenting bagi rakyat adalah hasilnya. Dan kenyataannya saat ini rupiah anjlok dan berimbas pada melambungnya harga berbagai bahan pokok. Kondisi tersebut jelas sangat menyengsarakan rakyat.

“Yang penting buat rakyat adalah hasilnya, rakyat tidak peduli dengan sistem yang digunakan pemerintah. Rakyat tidak ada urusannya dengan ekspor dan menguatnya mata uang lain. Kenyataannya, saat ini rupiah anjlok dan berimbas pada naiknya harga berbagai bahan pokok yang cukup menyengsarakan masyarakat dan membuat rakyat menjerit,” tegas Alimin. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/iw.

Pemerintah Harus Segera Susun SOP Bencana Penerbangan

Anggota Komisi V DPR Fauzi H. Amro dari Fraksi Hanura (Sumsel I) mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur udara khususnya Kawasan Indonesia Timur.

“Terkait pembangunan infrastruktur bandara yang pertama yaitu persoalan lapangan bandara, kedua persoalan airlines, kita akui khusus perhubungan udara yang bisa memikat ke kawasan timur itu karena potensi wisatanya, SDA, maupun budayanya,” katanya kepada Parlemen, Selasa, (7/4).

Menurutnya, DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur di kawasan Timur tidak hanya perhubungan udara, tetapi juga darat, maupun laut.

Menyinggung kasus kecelakaan Air Asia maupun delay Lion Air, dirinya mengharapkan agar kejadian tersebut jangan sampai terulang lagi. “Karena itu para stakeholder harus membuat SOP Krisis tidak hanya menyangkut soal delay (keterlambatan) tetapi juga waktu krisis menangani bencana,” jelasnya.

Dia menambahkan, ketika kecelakaan terjadi terlihat tidak adanya SOP yang detail mengatur soal itu. “Kalau kebakaran bagaimana penanganannya,



Anggota Komisi V DPR Fauzi H. Amro

tergelincir, ini baru sebatas koordinasi dengan instansi lainnya,” katanya.

Panja Penerbangan

Terkait Panja penerbangan, Fauzi mengatakan, pada intinya Panja ini dibentuk dalam rangka menyikapi terjadinya kecelakaan Air Asia dan kasus delay Lion Air.

“Kita ingin tahu landasan filosofisnya apa sih kategori keamanan, keselamatan maupun kualitas penerbangan, dengan mengundang langsung para stakeholder dari Pakar penerbangan,

angkasa pura I dan II, maupun Kementerian perhubungan diantaranya memberikan masukan kepada DPR RI,” katanya.

Belum lama ini, lanjutnya, Panja juga telah melakukan Kunjungan spesifik ke Surabaya, Makasar, maupun Riau dan Batam. “Kita juga telah meninjau Bandara Halim Perdanakusuma, untuk melihat langsung berbagai *maintanance* Lion Air, Garuda Indonesia,” jelasnya.

Dia menambahkan, Panja ini akan terus berproses dan berjalan. Artinya DPR RI ingin adanya klafifikasi yang jelas terkait namanya keamanan, keselamatan dan kualitas penerbangan. “Yang paling penting lagi kita fokus kepada kejadian yang waktu itu baik Air Asia, dan Delay Lior air jangan terulang lagi,” katanya.

Dia meminta para stakeholder yang terlibat segera membuat SOP Krisis tidak hanya yang mengatur persoalan delay pesawat tetapi juga penanganan bencana ketika terjadi kecelakaan pesawat. “Ini terlihat masih tidak ada SOP yang detail, kalau kebakaran bagaimana, tergelincir bagaimana baru sebatas koordinasi dengan instansi lainnya,” paparnya. (Si) foto: naefurodji/parle/hr

Hindari Polemik, Diusulkan Anggota DPR Beri Mobil Dinas

Anggota Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Muslim mengatakan, kenaikan uang muka mobil pejabat yang diusulkan adalah keinginan semua teman-teman anggota. Kalau sekarang ramai dan menjadi konsumsi publik, itulah dinamika politik. Padahal semua sudah sepakat, tapi begitu muncul kritik keras di media, semua balik badan.

Ditemui sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR Selasa (7/4), anggota Dewan dari Partai Demokrat Dapil II Aceh ini mengatakan, sebagian anggota perlu fasilitas mobil tersebut, apalagi anggota baru yang terpilih tahun 2014 lalu.

Akibat polemik tersebut, menurut dia ke depan lebih baik diberikan mobil



Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Muslim

dinas saja sesuai standar. Terkait dengan pencabutan Perpres uang muka mobil dinas tersebut, menurut Muslim, itu adalah wewenang Pemerintah, dan BURT akan mendiskusikan kembali seperti apa. Apakah nanti sepakat untuk diadakan mobil dinas atau fasilitas yang lain.

“Saya berharap keputusan bisa diambil dan disepakati semua fraksi di BURT. Itu kan untuk kepentingan anggota dan memudahkan langkah-langkah buat rakyat juga,” katanya.

Makanya, sambung dia, kalau ini menjadi polemik terus menerus, samakan saja fasilitas yang diberikan kepada seluruh pejabat negara. Kalau teman-teman menginginkan mobil

dinas, silahkan. Itu kan lebih fair, tidak menjadi polemik seperti sekarang ini.

Menanggapi pertanyaan bahwa kenaikan itu bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat di tengah kesusahan karena kenaikan BBM dan kebutuhan pokok, ia menilai itu sangat normatif. Karena fasilitas mobil dimaksudkan untuk menunjang kinerja kegiatan dewan. “Kita kan tidak minta

yang aneh-aneh. Lihat saja, di level departemen, pejabat eselon I apa saja fasilitasnya. Kita bukan nggak prihatin pada rakyat, kita dalam beberapa tahun tidak mengajukan apa-apa,” kilahnya.

Meski demikian, ia menyatakan masalah Perpres ini akan dibahas kembali dalam rapat BURT. Tuntutan anggota Dewan tidak berlebihan, cukup obyektif. Apalagi teman-teman yang baru

terpilih perlu fasilitas mobil itu, jadi hak dan kewajiban harus ada. “Yang kita perjuangkan adalah kepentingan seluruh anggota DPR. Kalau selalu menjadi polemik, kenapa kepada seluruh anggota dikasih mobil dinas saja. Kan lebih obyektif,” tandas Muslim menambahkan. (mp) foto:iwan armanias/parle/iw

Target Pertumbuhan tak Tercapai Turunkan Kredibilitas

Target pertumbuhan ekonomi yang disepakati Pemerintah dan DPR sebesar 5,7% harus realistis. Dan pemerintah juga dihimbau agar tetap optimis mengejar target. Bila tidak tercapai, ini bisa menurunkan kredibilitas.

Demikian disampaikan Fithra Faisal Hastiadi, ekonom asal Universitas Indonesia (UI) dalam diskusi bertajuk Peramalan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2016, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (6/4). Hadir pula sebagai narasumber Aviliani ekonom Indef dan Gede Prayitno dari SKK Migas.

Menurut Fithra, sepanjang tahun 2007-2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di kisaran 5,2%. Sementara target pertumbuhan 2015 sebesar 5,7%. Ada gap dari target pertumbuhan sebelumnya yang harus direalisasikan pemerintah. ini bukan perkara mudah. “Angka yang moderat sebetulnya 5,5%,” ungkap Fithra.

Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2015 ini, lanjut Fithra, karena berakhirnya stimulus moneter di Amerika dan melambatnya ekonomi Cina. Hasil kajian ekonomi UI menyebutkan, proyeksi ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh tidak lebih dari 6% sampai tahun 2018.



Suasana diskusi bertajuk Peramalan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2016

Sementara itu, Aviliani menyorot lemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Menurutnya, bila uang masuk lebih banyak daripada uang keluar, rupiah akan menguat. Selama ini yang terjadi uang keluar lebih banyak karena dipengaruhi impor. Uang dolar yang banyak beredar juga melemahkan rupiah. Selama Presiden Obama masih berkuasa, rupiah masih sulit untuk terus menguat seperti dulu.

Pasalnya, pemerintah Amerika terus mencetak uang begitu banyak setiap bulan untuk kebutuhan global. “Sayangnya sekarang Eropa ngikuti Amerika dalam mencetak uang. Tetapi

mata uang euro itu tidak menjadi mata uang dunia, Jadi tidak berefek kepada kita. Mungkin efeknya nanti pada investasi secara langsung yaitu FDI,” katanya. Faktor eksternal ini masih cukup berpengaruh terhadap rupiah.

Faktor internal, lanjut Aviliani, harus betul-betul dikuasi oleh pemerintah untuk mengimbangi faktor eksternal agar rupiah kembali stabil. Paket kebijakan yang kemarin dikeluarkan pemerintah untuk menerapi rupiah sebetulnya kebijakan jangka panjang. Kita juga butuh kebijakan jangka pendek. (mh, gt), foto : naefurodjie/parle/hr.

Indonesia Harus Jadi Basis Produksi Otomotif

Investasi otomotif yang sangat terbuka di Tanah Air, harus menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia, setidaknya untuk ASEAN. Banyak produsen mobil dari berbagai negara terus menambah nilai investasinya di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) menegaskan hal tersebut saat dihubungi Senin (6/4). Untuk kawasan ASEAN saja, kata Heri, potensi pasar Indonesia mencapai 38% dari total penjualan. “Indonesia masih menjadi tujuan investasi sejumlah perusahaan otomotif global.

Toyota asal Jepang berinvestasi Rp20 triliun pada 2015-2018. Suzuki menambah US\$ 1 miliar untuk dua tahun ke depan. Belum lagi investasi otomotif asal Jerman.”

Heri mengapresiasi komitmen beberapa perusahaan otomotif dunia tersebut yang terus menambah nilai investasinya. Tentu saja komitmen itu perlu diatur dengan kebijakan yang jelas dan tegas. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) menyebutkan, angka penjualan mobil di Indonesia terus meningkat. Tahun 2013 dan 2014 mencapai 1,2 juta unit, naik 10% dibanding 2012 yang hanya 1,1 juta unit. Pada 2015 diperkirakan tetap di angka 1,2 juta.

“Kelas menengah Indonesia diprediksi akan terus tumbuh hingga 64% atau sekitar 68,2 juta jiwa sampai tahun 2020. Ini adalah pasar potensial yang akan memperkuat struktur industri otomotif Indonesia. Investasi yang masuk harus menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan produksi dan bukan hanya konsumsi. Saat ini, pasar otomotif Indonesia sekitar 90% dikuasai pabrikan asal Jepang. Sisanya diperebutkan produk dari sejumlah negara, seperti Amerika, Korea Selatan, dan Eropa,” papar Anggota Fraksi Gerindra ini.

Heri berharap, di tahun-tahun mendatang, Indonesia jangan hanya menjadi tujuan pasar, lebih dari itu harus menjadi basis produksi, baik komponen otomotif, elektronik, dan mobil. Investasi otomotif juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,7% pada 2015. Pemerintah juga, lanjut Heri, harus menjamin investasi sektor otomotif mampu menyerap tenaga kerja yang luas.

Penyerapan tenaga kerja disinyalir terus berkurang seiring



Pimpinan Komisi VI DPR Heri Gunawan dan Dodi Reza Alex Noerdin

penggunaan mesin-mesin produksi yang masif di sektor manufaktur termasuk otomotif. Sebelumnya, dengan nilai investasi US\$ 1 juta mampu menyerap 100 tenaga kerja baru. Saat ini dengan nilai yang sama justru malah berkurang dengan penggunaan mesin-mesin tersebut.

“Kementerian Perindustrian harus memastikan skema investasi yang masuk menjadi cikal bakal pengembangan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional dan mengarahkan industri otomotif berorientasi ekspor. Kandungan lokal dalam setiap produksi harus ditingkatkan. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan insentif yang diperlukan agar ekspor dapat ditingkatkan 30% sampai 35% dari total produksi,” jelas Heri lebih lanjut. (mh), foto : naefuodjie/parle/hr.

Bansos Perlu Disosialisasikan Dengan Baik

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi pemberian bantuan sosial (bansos) dengan lebih baik. Dengan demikian kejadian seperti pemberian bantuan traktor Presiden untuk petani yang menimbulkan keributan tidak terulang kembali.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan Raker Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman Kamis (2/4) di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Kesimpulan raker yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron juga menyatakan, DPR menerima penjelasan terkait pemberian bantuan traktor kepada masyarakat di Kabupaten Ponorogo dan perkembangan bantuan lainnya.

Menurut Amran Sulaiman, pemberian bantuan traktor R2 sebanyak 400 unit sebenarnya bukan untuk Kabu-

paten Ponorogo saja. Namun sebagian merupakan alokasi Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, yang pada saat acara beberapa waktu lalu, perwakilan kelompok tani dari Kabupaten lain juga hadir. Oleh karena itu, sebagian traktor diangkut untuk didistribusikan ke Kabupaten lain di Jawa Timur.

Tetapi lanjut Mentan, oleh sebagian petani di Ponorogo, diartikan adanya penarikan kembali pembagian traktor. “Permasalahan pembagian traktor pasca pencaangan tersebut telah kami selesaikan. Yang akan datang, proses sosialisasi kepada masyarakat petani akan kami lakukan lebih baik lagi, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” janji Amran.

Kesimpulan raker lainnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersub-



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron

sidi. Yaitu meliputi data kebutuhan alokasi pupuk bersubsidi perwilayah, serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar melibatkan GAPOKTAN dan koperasi yang sudah memiliki kemampuan manajerial serta finansial yang baik untuk menjadi distributor atau kios pupuk bersubsidi.

Komisi IV DPR RI juga berharap agar Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi serta mengoptimalkan kinerja komisaris pengawas pupuk dan pestisida. (mp,ipk), foto : riska arinindya/parle/hr.



Komisi XI DPR Konsen Dan Kawal Terus Penerapan Mata Uang



Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia

Komisi XI DPR RI akan konsen dan terus mengawal serta mendorong pihak-pihak terkait untuk bisa mensosialisasikan penerapan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara intensif agar kedaulatan mata uang rupiah bisa berdaulat di negeri sendiri.

Hal ini diungkapkan Politisi PDI Perjuangan Indah Kurnia saat ditemui Parle di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan

Barat (Kalbar) baru-baru ini.

“Jadi problem utama penerapan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah kurangnya sosialisasi,” kata Indah.

Selain itu, problem utama yang ada di Provinsi Kalbar, kata Indah, adalah masalah infrastruktur. Menurut Indah, masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah, efisien, dan ekonomis melakukan transaksi jual beli, dengan

negara tetangga, Malaysia.

“Masalah kurangnya sosialisasi penerapan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini akan kita bawa dalam rapat pleno Komisi XI dan masalah Infrastruktur walaupun bukan domain Komisi XI tetap akan kita sampaikan kepada Komisi terkait yang membidangi masalah infrastruktur,” kata Indah seraya menambahkan untuk Provinsi Kalbar perlu mendapatkan perhatian khusus masalah infrastruktur.

Wakil Gubernur Provinsi Kalbar Christiandy Sanjaya membenarkan kurangnya sosialisasi tentang Mata Uang di daerah perbatasan dan membenarkan pula belum adanya pembangunan infrastruktur.

“Kita menitipkan masalah infrastruktur ini pada Komisi XI DPR untuk menyampaikan kepada komisi terkait, untuk membangun Provinsi Kalbar beberapa tahun kedepan,” kata Christiandy.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perbatasan ini sangat penting, agar tidak memperburuk keadaan terutama ketersediaan mata uang diperbatasan.

(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

UU Mata Uang Masih Perlu Sosialisasi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengaku prihatin dengan fakta adanya masyarakat perbatasan yang tidak mengetahui larangan transaksi jual-beli barang dan jasa menggunakan uang asing di wilayah Indonesia. Seluruh lembaga dan institusi terkait perlu mengemban tugas bersama untuk membangun pemahaman ini di tengah masyarakat.

“Kita giatkan sosialisasinya karena kita melihat kebijakan pemerintah. Kebijakan untuk mengatasi lemahnya kurs rupiah terhadap dollar salah satunya point ke 8 yaitu mendorong agar penggunaan transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah,” katanya kepada wartawan disela-sela pertemuan antara Tim Kunker Spesifik Komisi XI dengan Wagub Prov. Kalbar, Kepala KPwBI, Kepala OJK, PHRI, PVA dan Kadinda Prov.Kalbar, di Gedung KPwBI Pontianak, Kamis (2/4/2015).

Jon Erizal membenarkan bahwa berbagai permasalahan



Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal dan Wagub Prov. Kalbar Christiandy Sanjaya

yang ada juga tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan ia berkomitmen akan lebih giat melakukan sosialisasi.

Ia menambahkan bahwa sesuai dengan informasi Wagub Prov. Kalbar ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur, yang umumnya masyarakat di 14 kecamatan yang berada diperbatasan langsung dengan Sarawak menggunakan ringgit dalam transaksi perdagangan dengan masyarakat negara tetangga dan mereka sangat familiar dengan mata uang ringgit.

Politisi Fraksi PAN ini berharap perlu adanya penyikapan dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih giat lagi mensosialisasikan UU No.7 Tahun 2011

tentang Mata Uang.

Wagub Prov. Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan ada dua mata uang diperbatasan, dengan ekonomi yang kuat pembayaran menggunakan ringgit diperbatasan bisa dihindari. Karena faktor ekonomi lebih dekat ke Malaysia sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Christiandy mengakui adanya pemberlakuan pembatasan transaksi 600 ringgit per KK masih berlaku selama belum adanya aturan yang baru. "Saat ini mata uang sudah berlaku semestinya kecuali diperbatasan," kata Christiandy. Mulai dari PHRI dan Kadin sudah menggunakan rupiah, tambahnya. (iw/iky) foto: iwan armanias/parle/hr

Panja BPIH DPR Minta Kemenag Buat Plan B

Ketua Panja BPIH (Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid meminta Panja Kementerian Agama untuk membuat Plan B (rencana kedua) terhadap penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2015 mendatang.

"Kami telah melakukan pertemuan resmi pertama kalinya setelah temuan Panja BPIH Komisi VIII di tanah suci beberapa waktu lalu. Setelah panjang lebar kami diskusikan, maka kami menyimpulkan Panja BPIH DPR meminta Panja Kemenag untuk membuat Plan

B atau rencana kedua terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2015 mendatang," ungkap Sodik yang juga sebagai wakil Ketua Komisi VIII ini.

Dijelaskannya, Plan B yang dimaksud intinya meminta Panja BPIH Kementerian Agama untuk menyisir ulang 17 elemen haji yang berpotensi mengalami penurunan, seperti biaya pesawat, pemondokan, catering dan transportasi darat yang kesemua itu termasuk dalam *direct cost*. Dengan demikian dikatakan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, Biaya Perjalanan Ibadah Haji



Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid

pada tahun 2015 ini dapat turun sekitar 20 persen dibanding tahun lalu. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Komisi X Apresiasi Kesiapan Bali Hadapi UN



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ridwan Hisyam (kanan) usai pertemuan dengan Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Bali dan jajaran

Komisi X DPR RI mengapresiasi kesiapan Provinsi Bali menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang akan digelar 13-15 April 2015. Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunspek Komisi X Ridwan Hisyam usai meninjau dan berdialog langsung ke SMA 5 dan SMK 2 Denpasar serta berdialog dengan Jajaran Pemprov Bali termasuk Kadikbud serta Panitia UN Bali, Rabu (8/4) sore.

Kesiapan tersebut menurut Kepala Dinas Pendidikan Bali Tia Kusumawardani, menjelang UN telah dilakukan pemetaan dan sebelumnya sekolah-sekolah telah diadakan Ujian Pematapan. Sedangkan distribusi soal UN pada Jumat (10/4) disampaikan dinas ke Rayon-rayon, sehingga pada hari H dijamin telah sampai ke semua sekolah.

Mengenai pengamanan soal-soal UN, pada saat distribusi dikawal polisi dan di SMA 5 yang menampung soal lima sekolah disimpan di ruang yang dijaga petugas dilengkapi dengan CCTV.

Ketua Tim Ridwan Hisyam menyam-

but baik kesiapan ini termasuk distribusi soal sebab wilayah Bali yang terdiri 9 kota/kabupaten relatif mudah dijangkau. Sehubungan kebijakan bahwa UN tidak menjadi satu-satunya syarat kelulusan ia menyatakan sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat.

“Saya kira tidak memengaruhi psikologis siswa. Laporan yang diterima justru siswa tetap semangat apalagi sekolah diberi ‘kekuasaan’ sehingga lebih bertanggung jawab” tegasnya.

Kepala Sekolah SMA 5 Denpasar

Nyoman Winata mengatakan sebelum UN para orang diundang untuk diberi pengarahan agar putranya tetap bersemangat. Mereka diminta tetap bisa mempertahankan prestasi sekolah ini yang bisa lulus 100 persen dan sebanyak 60 persennya masuk PTN dan 40 persennya masuk PTS.

“Saya mengapresiasi SMA 5 yang 4 tahun berturut-turut mempertahankan prestasi SMA baik dengan penghargaan tertinggi Adiwiyata Mandiri” ucap anggota tim Ismayatun.

Ridwan Hisyam menambahkan, UN kali ini akan menjadi ujian kejujuran sebab pengawasannya tidak seketat sebelumnya hanya dari rayon yang ditugaskan secara silang. Selain itu sekolah tidak lagi kejar target dengan janji promosi jabatan. “Kalau masih ada target-target maka akan terjadi kecurangan. Target untuk meningkatkan prestasi boleh, tapi kalau untuk promosi jabatan diwarnai kecurangan, jangan terjadi lagi,” ungkap Ridwan menegaskan. (mp)

DPR RI Apresiasi Pelestarian Subak Badung



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam dan tim kunspek berdialog dengan Pemkab Badung

Ketersediaan lahan pertanian untuk tercapainya swasembada pangan makin mengalami degradasi, khususnya di Provinsi Bali yang terkenal dengan sumberdaya pariwisatanya. Padahal lahan pertanian juga menjadi trademark alami dari Pulau Dewata yang perlu dipertahankan.

Demikian mengemuka saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, Selasa (7/4) yang menyoroti alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Badung. Kunjungan spesifik Komisi IV DPR ini bertujuan untuk melakukan pengawasan atas terselenggaranya

UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bertempat di Subak Liplip di daerah Cangu Kecamatan Kuta Utara, Tim Kunker Komisi IV DPR berdialog dengan Pemda setempat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam mengapresiasi Pemerintah Badung yang telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam upaya mempertahankan lahan pertanian.

“Pemda sudah bagus dalam melakukan penghambatan terhadap laju konservasi lahan. Sudah ada berbagai kebijakan khusus dan fasilitas dari Pemda maupun Pemprov kepada para petani agar melestarikan lahannya untuk pertanian” ujar Ibnu yang memimpin kunjungan ini.

Kebijakan tersebut diutarakan Pemda Kabupaten Badung antara lain penghapusan pajak untuk lahan jalur hijau, keringanan PBB untuk lahan produktif dan pemberian insentif kepada subak (organisasi petani pengelola air) yang aktif serta subsidi pupuk dan bibit.

Hal ini dibenarkan oleh para petani yang turut hadir, bahwa kebijakan tersebut telah berjalan dan sangat membantu pengolahan sawah mereka. Dan lebih lanjut terungkap bahwa para petani subak masih membutuhkan alat khusus yang berfungsi mengangkat air yang mengalir sebelum menuju laut untuk melengkapi sistem subak mereka.

(ray) foto: rizka/parle/hr

DPR Serap Masukan RUU Jasa Konstruksi

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menyerap aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait penyempurnaan RUU Jasa Konstruksi. Stakeholder terkait sep-

erti Pemprov Bali, Akademisi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan pihak terkait lainnya diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan.

“Kami ingin mendapatkan masukan secara keseluruhan terhadap RUU Jasa Konstruksi yang sedang kami susun ini,” kata Ketua Tim Kunjungan Lasarus dalam pertemuan di Bali, Rabu (8/4/15).

Selain itu, kata Lasarus, pertemuan kali ini juga untuk meminta tanggapan terhadap isu-isu khusus, diantaranya pertama, mengenai permasalahan kelembagaan, dimana dalam RUU



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus

ini terdapat dua kelembagaan yaitu Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Nasional (BASJKN) serta Lembaga

Fasilitas Nelayan di Sulbar Masih Minim

Fasilitas dan infrastruktur nelayan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mamuju, Sulawesi Barat dinilai masih sangat minim. Perlu kebijakan khusus untuk mendorong peningkatan fasilitas seperti SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) nelayan, alat pendingin dan kebutuhan nelayan lainnya.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi, saat meninjau TPI Mamuju, dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (7/04/15). Dalam kesempatan ini, rombongan tim kunspek Komisi IV didampingi Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Menga.

“Jika kita melihat kondisi fasilitas dan infrastruktur yang ada di TPI, kami harus akui masih sangat kurang, termasuk kesiapan es balok sebagai pendingin hasil tangkap nelayan. Ketersediaan alat pendingin (*cool storage*) untuk meminimalisir adanya hasil tangkap yang membusuk juga masih minim. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat,” jelas Viva, usai berbincang langsung dengan para nelayan.

Politisi F-PAN ini juga menyatakan, kunspek ini juga untuk melihat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menyerap aspirasi terkait persoalan nelayan. Sesuai dengan fungsi dan tugas DPR, yaitu melakukan fungsi pengawasan.

Politisi asal Dapil Jawa Timur X ini juga berjanji, hasil kunspek ini akan segera dibahas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat dimasukkan pada APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016. “Persoalan nelayan di Sulbar ini akan kita rapatkan bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,” janji Viva.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Parakassi juga menyatakan, permasalahan perikanan di Sulbar ini mengeliputi minimnya fasilitas, seperti ketersediaan BBM dan minimnya es balok untuk mengawetkan ikan. Padahal menurutnya, Sulbar memiliki potensi hasil laut yang menjanjikan.

Pengembangan.

Kedua, mengenai konsep RUU terhadap perubahan bidang usaha dan siklus pekerjaan konstruksi.

Ketiga, kegagalan konstruksi yang dalam RUU dibedakan menjadi kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan.

Keempat, terkait dengan kesetaraan antara penyedia jasa dan pengguna jasa kepastian hukum, maka dalam RUU ini diatur standar minimal kontrak kerja konstruksi.

“Dan kelima, RUU ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat jasa konstruksi baik pelaku usaha maupun tenaga kerja konstruksi didalam negeri dengan memberikan batasan dan persyaratan yang lebih selektif terhadap Badan usaha asing maupun tenaga ahli asing yang ingin mengerjakan pekerjaan konstruksi di Insdonesia,” jelas Lasarus yang juga politisi PDIP ini.

Kunjungan kali ini diikuti pula oleh anggota Komisi V DPR, diantaranya Yoseph Umarhadi, Budi Yuwoni, Damayanti Wisnu Putrantu, Sadarestuwati, Sudjadi, Sukur H Nababan dan Rendy Lamadjido. (nt) foto: nita/parle/hr



Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dan tim kunspek berdialog dengan nelayan TPI Kashiwa, Mamuju

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Muhammad Nasyit Umar (F-PD), Indira Chunda Thita Syahrul (F-PAN), Acep Dadang Ruhiat (F-PKB), Andi Akmal Pasluddin (F-PKS), dan Fadholi (F-Nasdem). (sf) foto: sofyan/parle/od

Komisi VII DPR Dukung PT WHW Dapat Insentif Ekspor

Wakil Ketua Komisi VII DPR Zairullah Azhar mendukung diberikannya insentif ijin ekspor seperti Freeport untuk PT WHW Kalbar. Pasalnya, ada ribuan pekerja yang nasibnya bergantung hidup dari PT WHW Kalbar.

“Kita telah melihat langsung PT. WHW tentang teknis pembangunan terutama pembangunan bauksit. Ini sudah cukup maksimal. bahkan prosentase pembangunan sudah mencapai 50 persen,” jelasnya kepada Parlemen baru-baru ini.

Menurutnya, terdapat beberapa catatan penting saat kunjungan ke Kabupaten Ketapang ini. Diantaranya DPR sepakat bahwa ada ribuan orang bergantung hidup atas kelangsungan PT WHW. “Apabila ini distop tidak boleh ekspor tentunya dapat meningkatkan pengangguran dan berdampak tingginya kriminalitas,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ini juga akan berdampak kepada industri hilirnya. “Kita berpikir akan mendesak dan memberikan pengecualian atau insentif terhadap WHW Kalbar agar bisa mendapatkan ijin ekspor seperti yang didapatkan oleh Freeport,” katanya.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zairullah Azhar bertukar cinderamata dengan PT WHW Kalbar

Menurutnya, Pemda Ketapang juga memberikan catatan bahwa adanya penurunan dana perimbangan maupun lain-lainnya karena perusahaan ini tidak mendapatkan ijin ekspor.

“Ini semua untuk kepentingan Masyarakat Kalimantan Barat, dan berdasarkan laporan Pemda juga terjadi penurunan dana perimbangan maupun lain-lain. alasan objektif kita akan kita diskusikan kembali dengan Pemerintah dan segera memformulasikan menjadi rekomendasi agar

segera terealisasi,” katanya.

Dia mengharapkan persoalan ijin ekspor ini dapat segera selesai dalam waktu 1-2 bulan kedepan. “Semoga saja dapat segera selesai,” ujarnya.

Berdasarkan penerapan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU tersebut melarang ekspor mentah barang tambang mineral mulai 2014, dengan mewajibkan pengolahan dilakukan di dalam negeri. (Si) foto: sugeng/parle/hr

Fasilitas Bandara Kawasan Timur Minim



Tim Kunker Komisi V DPR RI saat meninjau hangar bandara Hassanudin yang ambruk di Makassar

Panja Keamanan Keselamatan penerbangan nasional menilai fasilitas bandara khususnya kawasan Timur masih minim. Karena itu, Pemerintah diminta segera melakukan inventarisir Bandara yang perlu diprioritaskan mendapat dukungan anggaran.

“Banyak yang harus dibenahi mulai dari fasilitas bandara yang masih belum memadai dan maksimal. memang bandaranya layak tetapi masih minim fasilitasnya,” ujar anggota DPR dari Fraksi PAN Bakri kepada Parlemen, Selasa, (7/4).

Menurutnya, banyak sekali kasus atau kejadian pesawat tergelincir karena landasan amblas. “Karena itu kita ingin mencari jalan terbaik untuk membangun bandara khususnya perintis.” katanya.

Dia mengatakan, DPR sudah beberapa kali rapat dengan Kementerian Perhubungan Udara membahas mengenai bandara di kawasan Indonesia Timur. “Memang banyak bandara yang fasilitas minim, jadi untuk membangun bandara jangan perhitungkan untung rugi. Kita bisa lihat mana yang bisa dibangun atau tidak kita lihat ini suatu kebutuhan. Banyak daerah yang minim pendapatannya dan transportasinya hanya lewat udara,” jelasnya.

Dia menambahkan, kita harus segera membangun bandara perintis dengan cara mensubsidi bandara tersebut. “Kita harus subsidi jangan bicara keuntungan. Yang lebih penting juga kita sampaikan bandara yang dikelola Angkasa Pura sekarang ini banyak yang mengeluh karena adanya aturan UU bahwa bandara yang dikelola Angkasa Pura tidak lagi bisa dianggarkan APBN. Misalnya di Medan, bandara perintis yang dikelola Angkasa Pura tetapi

tidak mendapat anggaran. Kita ingin yang kira-kira disubsidi semua harus di subsidi,” katanya.

Menurutnya, bandara perintis yang ada jangan semua diserahkan kepada BUMN Angkasa Pura. Karena mereka sudah *profit oriented* jadi lebih baik disubsidi. “Fasilitas pemerintah jangan bicara untung rugi tetapi bicara pelayanan,” katanya. (Si) foto: sugeng/parle/hr

Bangsral Kelas III RS Doris Sylvanus Palangkaraya Perlu Perbaikan



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf berdialog dengan pasien RS Doris Sylvanus

Komisi IX DPR RI meninjau pelayanan BPJS dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Doris Sylvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satu fasilitas yang paling menjadi perhatian adalah bangsal kelas III yang menjadi harapan masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Bila kita bicara masalah pelayanan rumah sakit, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meninjau pelayanan pasien yang berada di ruang kelas III. Sebab kalau kita bicara pelayanan di kelas *Very Importen Person* (VIP) atau kelas I, itu sudah biasa karena pasti pelayanannya yang cukup baik dan maksimal”, kata Ketua Komisi IX Dede

Yusuf saat memimpin kunjungan, Kamis (9/4/15).

Dalam kunjungan tersebut Tim Komisi IX menyoroti fasilitas di bangsal seperti plafon yang berlubang, ventilasi udara yang minimal sementara kipas angin yang terpasang tidak berfungsi. Politisi Fraksi PAN ini berharap manajemen rumah sakit dapat melakukan perbaikan agar fasilitas bisa sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Ada fasilitas yang memperhatikan karena bangunan bangsal dan ruang itu kan ada aturannya. Ini juga merupakan harapan dari Direktur Rumah Sakit

Doris Sylvanus Rian Tangkudung ini butuh dukungan serta *support* untuk pembangunan rumah sakit yang lebih layak dan itu kita *support* sekali.” lanjut Dede.

Tim Kunjungan Komisi IX dalam kesempatan itu juga berkeliling meninjau fasilitas lain diantaranya ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), selanjutnya rombongan beralih ke ruang BPJS untuk memantau pelayanan pihak rumah sakit terhadap masyarakat pengguna kartu BPJS.

“Pelayanan untuk warga yang menggunakan BPJS termasuk yang perlu rawat inap sudah cukup baik. Artinya para pasien telah terlayani dengan baik dan benar,” papar

mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dalam kunjungan tersebut banyak melakukan dialog dengan pasien dan tenaga medis

Sebelumnya di Ruang Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Tim Kunjungan Komisi IX juga melangsungkan pertemuan dengan Gubernur Kalteng yang diwakili Assisten II Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, BPJS, Kepala Kesehatan Kabupaten/Kota se Prov. Kalteng, Direktur Rumah Sakit Umum, Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). (hr/iky) foto: eka hindra/parle/od



Komisi V Desak Pemerintah Kembali Kuasai Udara Batam, Tanjung Pinang dan Natuna



Tim Kunker Komisi V DPR RI saat meninjau Bandara Hang Nadim, Batam

Sehubungan dengan dikuasainya *Flight Information Region (FIR)* wilayah Batam, Tanjung Pinang dan Natuna oleh negara tetangga Singapura, Komisi V mendesak Pemerintah berupaya kembali menguasai FIR di wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Penerbangan.

Anggota DPR RI Nurhayati (F-PPP/Jawa Barat III) mengatakan, Airnav Indonesia dan Kementerian Perhubungan sudah siap untuk mengambil alih FIR dari Singapura, Pemerintah diminta segera melakukan negosiasi dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) dan Singapura.

“Indonesia punya perjanjian inter-

nasional dengan ICAO yang harus di negosiasi ulang, antara Pemerintah, ICAO, dan Singapura,” Kata Nurhayati, saat mengikuti Kunjungan Spesifik Tim Pantia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional, di Bandara Hang Nadim-Batam, baru-baru ini.

Menurut Nurhayati, unsur Pemerintah ini terdiri dari Menkopolkam, Kemenhub, Kemenlu, Kemenhan dan TNI, karena bukan hanya pesawat komersil yang mereka pantau, termasuk pesawat militer juga harus melaporkan kepada Singapura. “Segera Pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan ICAO dan Singapura, untuk mengontrol wilayah kedaulatan kita

sendiri,” tegasnya.

Komisi V mengkhawatirkan apabila ruang udara tidak dikelola dengan baik oleh Indonesia, maka ruang udara Indonesia akan dikelola oleh Negara tetangga yang telah memiliki sistem sesuai dengan program ICAO.

“Sebenarnya tidak berdampak signifikan, tapi ini merupakan wilayah teritorial NKRI. Masalah kedaulatan, negara besar seperti Indonesia dikontrol negara kecil,” ungkap Nurhayati.

Patut diketahui, sejak 1946 silam, Pemerintah Singapura menguasai wilayah udara Batam, Natuna dan Tanjung Pinang setelah mendapat mandat dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*Internasional Civil Aviation Organization/ICAO*) dan diperkuat perizinan dari Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan mandat itu, seluruh pesawat, termasuk pesawat militer Indonesia yang ingin mendarat, lepas landas, atau sekedar melintas atas Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna wajib menginformasikan dan izin dari Singapura.

Mandat ICAO tidak hanya memberi Singapura kewenangan mengatur lalu lintas udara di dalam FIR, juga hak memungut *fee* atau bayaran dari seluruh maskapai yang melintas FIR. Pengaturan lalu lintas udara atau *Air Traffic System Provider (ATS)* wilayah tersebut juga merujuk pada perjanjian pen-delegasian FIR pada tahun 1995 yang dievaluasi kembali pada tahun 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Kepres No.7 Tahun 1996. (as) foto: agung/parle/hr

Komisi VI DPR Tinjau Djakarta Lloyd

Tim Komisi VI DPR meninjau langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta untuk menyaksikan dari dekat beberapa kapal yang sedang diperbaiki milik PT. Djakarta Lloyd (D’Lloyd). Peninjauan ini terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk D’Lloyd sebesar Rp350 miliar.

Setidaknya ada tiga kapal yang ditin-

jau pada Kamis (2/4). Satu di antaranya adalah kapal Sam Ratulangi yang memiliki kapasitas 1.600 kontainer. Kapal ini dibuat tahun 2001. Nilai perbaikan kapal tersebut tercatat Rp38,1 miliar. Dengan menggunakan speed boot Tim Komisi VI mendekati tiga kapal yang sedang dalam perbaikan di tengah laut. Terlihat kapal Sam Ratulangi berkarat hampir di

semua permukaan lambungnya.

Begitu pula kapal Jatiwangi dan kapal Lhokseumawe yang membutuhkan anggaran perbaikan masing-masing Rp22,6 miliar dan Rp19,2 miliar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan enam kapal plus biaya operasional mencapai Rp207,2 miliar. Tim Komisi VI yang meninjau D’Lloyd



Tim Komisi VI DPR meninjau langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Farid Al Fauzi, didampingi dua anggotanya Slamet Junaedi (F_Nasdem) dan Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB).

Usai peninjauan, Eem berkomentar, alokasi anggaran untuk D'Lloyd sebenarnya masih kurang. Ia me-

nyayangkan bila semua aset berupa kapal ini tidak diselamatkan. Kapal Sam Ratulangi, misalnya, bila tak diperbaiki mungkin akan tenggelam dua tahun lagi. Padahal, kapal ini pernah menjadi angkutan lintas negara. "D'Lloyd membutuhkan anggaran cukup besar.

Negara perlu turunkan tangan menghadapi hal ini," ujar politisi dari dapil Jabar III itu.

Selain perbaikan kapal, D'Lloyd juga mendapat anggaran dari PMN untuk pengadaan kapal Handymax 45.000 MT senilai US\$ 12 juta atau setara dengan Rp142,8 miliar. Ditambahkan Eem, D'Lloyd yang terus merugi karena aksi korporasi, memang, butuh suntikan anggaran. Suntikan anggaran tersebut juga untuk meningkatkan posisi kepemilikan saham pemerintah.

"D'Lloyd harus menjadi penggerak utama dunia pelayaran Indonesia. Dengan PMN itu, kepemilikan saham pemerintah minimal menjadi 51%.

Saya pernah sampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soewandi, bila saham pemerintah di D'Lloyd tidak sampai 51%, sebaiknya PMN tidak diberikan, karena legal standingnya tidak jelas," ungkap Eem. (mh) foto: husen/parle/od

Maskapai Penerbangan Diminta Tetap Utamakan Keselamatan

Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati (F-PPP) menilai perkembangan sektor penerbangan Indonesia semakin baik, namun masih harus terus ditingkatkan.

"Saya mengharapkan dunia penerbangan Indonesia jauh lebih baik dari sekarang, baik dari segi sarana, prasarana, maupun operator. Selain itu maskapai penerbangan lebih mengutamakan keselamatan dari pada keuntungan," kata Nurhayati, saat melakukan kunjungan bersama Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (2/4).

Menurutnya, bandara-bandara di Indonesia sebagian besar sudah melebihi kapasitas, jadi sepertinya sudah tidak memenuhi persyaratan. Namun ada



Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati

juga bandara-bandara yang baru yang masih baik, seperti bandara di Medan,

Makasar, dan Bali. Bandara Soekarno-Hatta menurutnya sudah terlalu padat.

Untuk layanan penerbangan perintis ke wilayah terpencil sudah mulai memadai dengan adanya *low cost carrier* semua lapisan masyarakat sudah dapat menikmati layanan penerbangan.

"Pada beberapa wilayah terpencil sebagian sudah terlayani, namun perlu dilihat terkait keperluan pelayanan penerbangan perintis di pulau terpencil," katanya.

Pelayanan maskapai dia rasa sudah memenuhi standar, namun dia masih meragukan perawatan pesawat di setiap maskapai. "Maskapai masih kesulitan terkait spare part yang harus masih membayar pajak masuk 10 persen. Ini membuat harga *spare part* menjadi mahal," ungkapnya. (as) foto: agung/parle



BPK Temukan 7.789 Masalah Senilai Rp 40,55 Triliun

Pada Semester II tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 651 obyek pemeriksaan, terdiri atas 135 obyek pada pemerintah pusat, 479 obyek pemerintah daerah dan BUMD, serta 37 obyek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdiri atas 73 obyek pemeriksaan keuangan, 233 pemeriksaan kinerja dan 345 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ketua BPK Harry Azhar Azis di depan Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Selasa (7/4) lebih jauh memerinci, dari 651 obyek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sebanyak 7.950 temuan pemeriksaan yang didalamnya terdapat 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan system pengendalian intern (SPI). Dari ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.293

masalah berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan atau berdampak finansial senilai Rp 14,74 triliun.

Menurut mantan Pimpinan Banggar DPR tersebut, masalah berdampak financial tersebut terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun. Selain itu, terdapat 3.150 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp 25,81 triliun.

Selama proses pemeriksaan, kata Harry, entitas telah menindaklanjuti masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan asset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp 461,11 miliar.

Dari pemeriksaan semester II tahun

2014, BPK menemukan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, diantaranya persiapan pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung penerapan Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada 2015.

Kendalanya antara lain, ketentuan turunan Peraturan Menkeu No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Pusat dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual tidak segera ditetapkan. Akibatnya, ujar Harry Azhar, muncul ketidakjelasan dalam menerapkan akutansi berbasis akrual pada satuan kerja pengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, ketidakseragaman penyajian keuangan di kementerian/lembaga dan ketidakhandalan data untuk menyusun laporan keuangan.

(mp)/foto:iwan armanias/parole/iw.



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kehormatan Delegasi Federal Jerman, HE. Prof. Dr. Norbert Lammert, Selasa (31/03) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW



Rapat Dengar Pendapat (RDP) BURT DPR RI dengan Sekjen DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso membahas pengembangan TV dan Majalah-Buletin Parlemtaria, Senin (06/04) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Subak Liplip, Kabupaten Badung, Bali (kiri) dan Kebun Percobaan dan Percontohan Kakao, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat (kanan), Rabu (8/04). Foto: Sofyan, Rizka/Parle